

**RUANG APA & SIAPA
ANGGOTA POLRI**

SOEPARNO SOERIA ATMADJA SEORANG ANGGOTA POLISI

*Oleh: Sunaryo *)*

(bagian pertama)

Masa Kanak-kanak dan sekolah

Tanggal empat Maret tahun 1919, telah lahir putera kedua dari sebuah keluarga pegawai negeri yang bertempat tinggal di gang Kenerlong, Kramat, Jakarta Pusat dan diberi nama oleh kedua orang tuanya Soeparno.

Ayah yang berbahagia tersebut bernama R. Rangga Soebrata Soeria Atmadja, seorang pegawai pamong praja berpangkat Komis anak ketiga dari keluarga R. Makbul Hakim Soeria Atmadja sebagai help Jaksa di Cirebon.

Dari perkawinannya dengan R. Mariati putri dari R. Sastra Diwiry, seorang Wedana di Jatibarang, R. Rangga Soebrata Soeria Atmadja telah dikaruniai dua belas orang anak, lima laki-laki dan tujuh perempuan. Anak pertama seorang perempuan bernama Soeryati telah meninggal dunia, anak kedua Soeparno (nama panggilannya Ino), selanjutnya Kartiwa bekerja pada sebuah Bank di Rotherdam, Roemini masih aktif di Departemen P & K, Soebadri bekerja pada Departemen Perindustrian Jakarta, Roesmiati bekerja pada perusahaan swasta PT. Indomilk, Abdul Rasid bekerja pada Bank Negara 46 di Ujungpandang, anak kedelapan adalah Muharam seorang lulusan Akademi Angkatan

**) Sunaryo adalah alumni PTIK Angkatan XVII. Karya ini merupakan skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Kepolisian yang dibimbing oleh Prof. Dr. Harsya W. Bachtier.*

Laut tahun '68 dan kini telah meninggal dunia, selanjutnya adalah Djumiarsih Soegiarti, Marlina dan yang terakhir adalah Maryeti tinggal di Bandung.

Sebagai anak laki-laki yang pertama, Soeparno sebagai pusat tumpuan kasih sayang dan perhatian kedua orang tuanya karena kepadanya nanti diharapkan dapat menjunjung tinggi nama dan martabat orang tua dan keluarga.

Masa kecil Soeparno di Jakarta tidak lama, karena pada tahun 1921, ayahnya mendapat tugas baru sebagai Komis Keresidenan Cirebon, jadi pada umur dua tahun Soeparno sudah dibawa boyongan oleh orang tuanya dari Jakarta ke Cirebon. Jabatan ayahnya ini pun tidak lama, karena beberapa bulan kemudian jabatan ayahnya dipindah, menjadi Sekretaris Kabupaten Cirebon.

Soeparno mulai mengecap bangku sekolah pada umur lima tahun, yaitu di tahun 1925 ia dimasukkan oleh ayahnya ke sekolah Hollands Inlands School (HIS) di Cirebon, sesuai dengan peraturan sekolah pada waktu itu, ia diharuskan melalui kelas percobaan (Voor Klas), sebelum memasuki kelas satu HIS. Jadi untuk menyelesaikan sekolah HIS memerlukan waktu selama delapan tahun, untuk kelas percobaan selama satu tahun, sedangkan untuk menamatkan HIS terakhir sampai kelas tujuh.

HIS memang diperuntukan bagi anak-anak bangsa Indonesia (inlander) yang mampu atau yang berada di kota, sedangkan untuk anak-anak di desa, disediakan bagi mereka sekolah di Volk School sampai dengan kelas lima kemudian dan melanjutkan lagi ke HIS. Lain halnya dengan anak-anak bangsa Belanda, untuk mereka disediakan sekolah tersendiri yang disebut Eropece Lagere School (ELS). Hanya sedikit sekali anak-anak bangsa pribumi (inlander) yang bisa memasuki sekolah ini dan mereka kebanyakan adalah anak-anak priyayi atau keturunan bangsawan.

Di Cirebon ada dua buah sekolah HIS, yaitu HIS yang mengajarkan bahasa Sunda dan yang lain mengajarkan bahasa Jawa. Walaupun bahasa yang dipakai oleh keluarga Soeparno sehari-hari adalah bahasa Sunda, akan tetapi jarak yang dekat dengan rumah Soeparno adalah sekolah HIS yang mengajarkan bahasa Jawa, oleh karena itu Soeparno dimasukkan oleh orang tuanya ke sekolah HIS yang mengajarkan bahasa Jawa, namun kedua

sekolah tersebut menggunakan bahasa pengantar yang sama, yaitu bahasa Belanda mulai dari kelas satu sampai dengan kelas tujuh.

Di kelas percobaan (*Voor Klas*), Soeparno pernah mempunyai seorang guru perempuan, yang setiap memperkenalkan dirinya selalu memakai sebutan *Meje vrouw "X"*, maksudnya adalah murid-muridnya tidak usah tahu namanya, tetapi cukup dipanggil dengan *meje vrouw "X"* saja, dari bibinya yang telah duduk di kelas lima, Soeparno akhirnya mengetahui bahwa guru tersebut namanya adalah Satidjah dan berasal dari Sumedang. Setelah satu tahun duduk di bangku kelas percobaan, Soeparno meneruskan ke kelas satu HIS.

Walaupun hidup dan dibesarkan di lingkungan keluarga pegawai negeri yang penuh dengan peraturan-peraturan namun Soeparno tidak dapat lepas dari kodratnya sebagai seorang anak yang sedang dalam pertumbuhan. Masa kanak-kanak penuh diwarnai dengan berbagai kenakalan, dari yang paling ringan hingga sampai pada hal-hal yang bisa membahayakan dirinya. Kebetulan rumahnya di Cirebon dekat dengan sungai dan laut, sehingga tempat bermain sehari-hari yang mengasyikkan adalah di laut atau di sungai. Pernah suatu sore, hampir saja ia tenggelam di kali karena belum pandai berenang, untunglah Tuhan menyelamatkannya walaupun perutnya sudah kenyang dengan air kali yang kotor.

Kebandelan Soeparno makin bertambah di kala sudah bisa menaiki sepeda, kalau ayahnya pulang dari kantor, biasanya sepedanya langsung di tempat tertentu, Soeparno selalu mengintip dan menunggu ayahnya hingga pergi tidur, kemudian dengan mencuri-curi ia membawa sepeda tersebut ke luar. Mula-mula belajar berputar-putar di halaman, tetapi lama-lama ia berani juga membawanya ke jalan raya dan mengunjungi kawan-kawannya. Ia bersahabat intim pamannya (adik ayahnya) yang bernama Arifin yang umurnya dua tahun lebih tua dari padanya, ia tinggal bersama dengan neneknya Ny. Soeria Atmadja. Melihat Soeparno sudah bisa naik sepeda, Arifin merasa heran karena ia sendiri tidak bisa naik sepeda. Akhirnya setiap Soeparno membawa sepeda ke rumah neneknya, Arifin memanfaatkan untuk belajar. Tetapi yang kena getahnya Soeparno juga, karena

setiap ia pulang terlambat selalu mendapat marah dari ayahnya.

Pernah suatu hari jari kaki Soeparno hampir saja putus karena masuk ke jari-jari sepeda, pada waktu itu ia diboncengkan oleh kawannya bernama Muharam, tidak puas rupanya kalau membonceng dengan duduk, maka ia mulai dengan aksinya membonceng dengan berdiri dan merasa bangga, karena jalan yang dilalui tidak baik dan berbelok-belok, maka keseimbangan badannya hilang dan mereka berdua jatuh, kaki Soeparno masuk ke jari-jari sepeda dan membuat jarinya hampir putus.

Sifatnya yang serba ingin tahu kadang-kadang membawa bahaya bagi dirinya, seperti halnya pada suatu hari ia memasang jari telunjuknya sebelah kiri di ujung laras senapan angin, dengan maksud untuk mengetahui seberapa besar tekanan udara senapan angin tersebut, tetapi apa yang terjadi, ternyata di dalam senapan angin masih terdapat pelurunya dan robeklah telunjuk Soeparno.

Kesabaran ayahnya melihat kenakalan Soeparno sudah sampai batas maksimal, untuk mendapatkan pengawasan yang lebih ketat Soeparno dititipkan dan diserahkan kepada pernah eyangnya yaitu Prawiradikarta yang rumahnya agak di pinggir kota Cirebon.

Di rumah pernah eyangnya, kenakalan Soeparno tidak berhenti seperti yang diharapkan oleh kedua orang tuanya.

Sekitar bulan Februari 1930 ayahnya yang pada waktu itu menjabat sebagai Ajun Sekretaris Kabupaten Cirebon, dipindahkan tugasnya menjadi Sekretaris Kabupaten Bandung, sehingga setelah naik kelas enam HIS yaitu pada bulan Juli 1930, Soeparno terpaksa dipindahkan dari sekolah HIS Cirebon ke HIS Bandung.

Menginjak umur duabelas tahun kenakalan Soeparno sudah agak berkurang karena bisa tersalur pada hal-hal yang positif dalam bentuk keberanian, ia sering bersama-sama kawannya bersepeda mulai dari kota Bandung, Cimahi, Soreang, Dayeuhkolot dan kembali ke Bandung.

Dari kesekian orang saudaranya, yang paling dekat dengan Soeparno adalah saudara yang nomer lima yaitu Soebadri, di mana kegemaran Soeparno adalah menggambar tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin terkenal seperti Bung Karno, Ratu Wihelmina. Apabila ia sedang sibuk menggambar, Soebardi dengan

setia menunggui, mengikuti dan kadang-kadang ikut mencoret-coret menirukan. Seperti Soeparno, Soebadri juga pandai dalam mata pelajaran ilmu pasti dan ilmu alam, sehingga ia berhasil melanjutkan sekolahnya ke HBS.

Salah seorang kawan Soeparno pada waktu sekolah HIS di Bandung yang berhasil ditemui oleh penulis di Bogor memberikan kesan: bahwa Soeparno adalah murid yang paling kecil di sekolahnya, berkepala gundul, tetapi ia adalah murid yang paling pandai di antara kawan-kawannya. Dari sifat yang selalu ingin tahu, ditambah dengan kemampuan menyerap dengan cepat sesuatu masalah, maka banyak hikmah yang dapat dipetik olehnya selama mengikuti sekolah di HIS. Perjuangan dari Pergerakan Nasional sampai puncak yang meresahkan dan merepotkan Pemerintahan Belanda. Ir. Soekarno dan kawan-kawannya yang tergabung dalam PNI (Partai Nasional Indonesia), menggunakan kota Bandung sebagai ajang perjuangan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia ke arah kemerdekaan. Pada bulan Juli 1929 rumah-rumah mereka digeledah dengan mem-babi buta, Pemerintah Belanda menangkap empat orang tokoh PNI, yaitu: Ir. Soekarno, Maskur, Gatot Mangoen Prodjo dan Soepriyadinata.

Proses pemeriksaan Bung Karno yang dihadapkan ke Pengadilan Negeri Bandung sekitar tahun 1930 sampai dengan 1931 sangat menarik perhatian masyarakat ramai, bukan saja sesama kaum pergerakan, juga wartawan dan mahasiswa/pelajar.

Mereka berkerumun untuk mendengarkan dan mengetahui bagaimana keputusan Pengadilan kolonial terhadap pemimpin-pemimpin mereka yang dituduh mengganggu ketertiban umum.

Lagi-lagi Soeparno kecil yang serba ingin tahu, ia selalu mencari kesempatan untuk dapat mendengarkan jalannya persidangan, karena setiap pulang sekolah ia selalu melewati tempat sidang dan tempat di mana Bung Karno ditahan. Hal inilah yang memupuk jiwa kebangsaan Soeparno sejak ia duduk di bangku HIS.

Pada waktu Soeparno masih di Cirebon, pernah suatu hari pamannya bernama Iskandar mahasiswa Recht Hight School (RHS) di Jakarta pulang ke Cirebon, setelah mengikuti Sumpah

Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, pamannya dengan semangat menceritakan tentang perjuangan-perjuangan Kemerdekaan bangsanya, dan bahkan sebelum pamannya kembali ke Jakarta ia sempat mengajarkan lagu Indonesia Raya pada Soeparno, sehingga pada usia yang cukup muda Soeparno sudah bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan lancar.

Jiwa kebangsaan Soeparno terus berkembang, karena suasana lingkungan keluarga ikut serta memberikan andil yang tidak sedikit, di mana bibi Soeparno adalah anggota dari Perkumpulan Indonesia Muda yang bertempat tinggal bersama Soeparno dan keluarganya di jalan Cibadak no. 17 Bandung. Kawan-kawan bibinya sering berkumpul di rumah, baik untuk mengadakan diskusi atau rapat-rapat tentang organisasi dan perjuangan bangsanya. Soeparno tidak pernah melewatkan kesempatan yang baik ini, ia selalu nguping apa yang dibicarakan oleh bibi dan kawan-kawannya. Suasana yang demikian ini selalu membekas di hati Soeparno dan tercetus dalam wujud dorongan-dorongan yang diperlukan untuk menyongsong di hari depannya.

Sedemikian hangatnya suasana perjuangan dan Pergerakan Nasional di Kota Bandung, sampai ada seorang guru Soeparno seorang bangsa Belanda bernama Yansen pernah mengatakan: Kapan sih, kita ini akan diusir dari Indie (sebutan Indonesia di saat itu) saya kira tidak lama lagi ya, toh tidak sampai dua puluh lima tahun lagi. Rupanya guru ini sudah merasa bahwa rakyat Indonesia sudah sangat mendambakan kemerdekaan.

Sebagai kenang-kenangan sebelum meninggalkan HIS, Soeparno meninggalkan hasil karyanya sebuah gambar potret Ratu Wihelmina bersama ibundanya untuk mengisi ruang kelasnya.

Ayah Soeparno bertugas di Bandung hanya sekitar dua setengah tahun, dalam bulan Nopember 1932 dipindahkan tugasnya ke Majalengka sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka. Soeparno yang pada saat itu telah menyelesaikan sekolahnya di HIS tidak ikut ke Majalengka, akan tetapi ia tetap di Bandung untuk melanjutkan sekolahnya di MULO (Meer Uitgebreit Lager Onderwijs).

Semangat belajar Soeparno makin bertambah setelah ia secara resmi diterima sebagai murid di sekolah MULO, karena

itulah yang menjadi cita-citanya setelah ke luar dari HIS. Para pengajar di MULO kebanyakan orang-orang Belanda, sedangkan mata pelajaran yang diajarkan antara lain: Pelajaran bahasa (Jerman, Inggris, Perancis), Ilmu Pasti, Ilmu Alam, Aljabar, Ilmu Ukur, Botani, Sejarah Umum, Ilmu Bumi.

Menginjak kelas dua Soeparno sudah mulai bisa memahami sifat-sifat dari pada masing-masing gurunya di sekolahnya. Mereka pada umumnya mempunyai sifat, ciri, tingkah laku yang berbeda-beda. Ada seorang guru yang suka melawak, kalau masuk kelas, misalnya setiap ia masuk kelas selalu memberikan komando pada murid-muridnya dulu untuk mengucapkan selamat pagi. Begitu ia masuk kelas, terdengarlah komando: *een, twee, drie*, yang kemudian disambut oleh murid-murid *goed morgen*. Lain lagi mengenai ceritanya guru Ilmu Alam, ia suka sekali dengan gadis-gadis Cina yang cantik-cantik, kalau ia sedang mengajar, memberi ulangan, ia selalu mendekati gadis-gadis Cina sehingga murid-murid yang lain merasa dianak-tirikan. Di samping itu ada guru yang suka memancing-mancing kesadaran politik di kalangan muridnya. Sedang guru yang bernama Ronteltap, suatu ketika tanya pada murid yang bernama Lubis, "Lubis, kamu mau merdeka atau tidak? Melihat Lubis masih ragu-ragu, ia melanjutkan, Ayo jawab, jangan ragu-ragu! Masih ragu-ragu juga Lubis menjawab, "Sebenarnya ya mau pak guru". Walaupun guru tersebut mengatakan tidak marah, akan tetapi ia mengatakan dengan suara yang keras. "Kamu tidak tahu bagaimana susahnya orang merdeka, apa di antara kamu ada yang bisa membuat kereta api, kapal terbang, gedung-gedung, mesin-mesin, jalan raya. Kata-kata guru tersebut tampaknya merupakan dorongan bagi muridnya, tetapi di balik itu semua terkandung maksud bahwa bangsa Indonesia ini belum waktunya merdeka atau belum pantas untuk merdeka.

Belum sempat Soeparno menyelesaikan sekolah MULO di Bandung, ia memutuskan untuk pindah sekolah MULO di Cirebon, dengan maksud agar lebih dekat dengan orang tua yang berada di Majalengka lebih dahulu dua tahun. Di Cirebon Soeparno tinggal bersama pernah eyangnya Prawiradikarta yang rumahnya berada di luar kota.

Pada waktu Soeparno menjelang lulus dari MULO, guru-gurunya menyarankan, agar ia melanjutkan ke Sekolah Teknik Menengah saja, karena nilai matematik dan menggambarinya baik sekali. Akan tetapi ia mempunyai cita-cita melanjutkan karier dari orang tuanya sebagai pegawai pamong praja, maka ia melanjutkan sekolahnya ke MOSVIA (Middel bare Opleidings School Voor Inlandse Ambtenaren) di Magelang.

Seperti di HIS pula, pada waktu sebelum meninggalkan sekolah MULO, Soeparno juga meninggalkan kenang-kenangan untuk sekolahnya, yaitu berupa sebuah gambar buruh.

Siswa-siswa sekolah MOSVIA semuanya di asramakan, sedangkan seluruh keperluan sekolah ditanggung sendiri oleh siswa. Walaupun banyak peraturan di asrama yang harus dipenuhi, Soeparno lebih senang sekolah di sini, sebab beaya asrama, makan beserta keperluan lainnya tidak terlalu mahal, sehingga uang kiriman dari ayahnya sebesar f. 42 masih ada sisanya cukup lumayan sisa ini ia tabung tiap-tiap bulan untuk keperluan hari libur nanti. Kecuali itu bila ada hari libur, ada tambahan uang, sebab siswa-siswa yang diasramakan itu mendapat pengembalian uang makan sebesar 35 sen perhari. Hari-hari yang sangat menyenangkan adalah, apabila tiba waktunya liburan, di samping mendapat pengembalian uang saku banyak, juga dapat melepaskan kerinduan pada orang tua dan keluarga di Majalengka. Di samping itu di Majalengka terdapat perkumpulan *Vacantie Bond*, yaitu, suatu perkumpulan liburan yang membuat acara-acara bagi siswa-siswa yang sekolah di luar kotanya. Dengan demikian setiap hari libur, tentu ada acara-acara yang menarik bagi siswa-siswa dan sekaligus pada kesempatan tersebut merupakan media komunikasi yang tepat untuk mempererat serta memperluas pergaulan.

Tidak ada hal-hal yang menonjol yang dilakukan atau dialami selama di MOSVIA, karena kegiatan banyak dipusatkan kepada mata pelajaran dan diselingi dengan olah raga. Kegiatan yang berbau politik sama sekali dilarang, apa lagi berorganisasi yang memperjuangkan kemerdekaan tidak diperkenankan, sehingga betapapun besar rasa kebangsaannya, Soeparno tidak sempat terjun ke kancah perjuangan politik, akan tetapi rasa kebangsaan yang telah menggores tebal di dada Soeparno tidak luntur begitu saja, hal ini terbukti dengan semangat yang ter-

pendam, satu yang menjadi cita-cita Soeparno, yaitu berhasil dalam menuntut ilmu. Dengan demikian kelak akan dapat menyumbangkan tenaga dan fikiran untuk ikut membangun dan mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan. Tepat pada waktunya yaitu pada akhirnya tahun 1939 Soeparno berhasil menamatkan sekolahnya.

Masa Peralihan

Walaupun tidak sempat terjun langsung ke dalam gelanggang pergerakan untuk kemerdekaan bangsanya, namun kesadaran berbangsa dan bertanah air semakin tebal di dada Soeparno. Pada usia yang relatif muda (20 tahun), pola pemikirannya sangat kritis dan jauh melambung ke depan. Tuntutan hati nuraninya merupakan motivasi yang kuat untuk memikirkan masa depan bangsanya yang sudah mendambakan kemerdekaan. Masih terngiang jelas di telinganya kata-kata Ronteltap, bekas gurunya ketika di MULO dulu. Apakah bangsa kita sudah cukup bekal atau modal kalau mau merdeka? Kenyataannya memang belum, kalau persyaratan merdeka seperti yang dikatakan oleh Ronteltap itu harus dipenuhi semuanya yaitu kita harus bisa membuat kereta api, kapal terbang, mobil-mobil dan mesin-mesin. Tetapi itu adalah bukan alasan untuk tidak berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Bahkan menurut Soeparno, apa yang dikatakan oleh Ronteltap itu merupakan tantangan dan cambuk bagi kita dan bagi seluruh bangsa yang ingin merdeka.

Lama juga Soeparno merenungkan, sumbangan apa gerangan yang kelak ia dapat berikan kepada bangsanya apabila telah dicapai kemerdekaan di kemudian hari? Akhirnya ia temukan suatu hal yang merupakan kunci pembuka tekadnya untuk mengabdikan diri pada cita-cita kemerdekaan, ia menyadari bahwa kemerdekaan adalah merupakan proses yang berlanjut. Artinya, ia menemukan sejumlah pertanyaan yang harus ia jawab sendiri, yaitu apa yang nanti dilakukan oleh putera-putera Indonesia setelah memperoleh kemerdekaan? Bagaimana dan siapa yang akan mengatur atau menjalankan roda pemerintahan dari pusat sampai ke daerah kalau semua hanya berjuang untuk memperoleh kemerdekaan? Bagaimana mengusahakan agar pemerintah-

an ini nantinya tidak macet apabila pegawai pemerintah Belanda sudah diusir dari bumi Indonesia? Siapa pengganti-pengganti mereka?

Jawaban yang tepat adalah, di antara pemuda-pemuda Indonesia sendiri harus sudah ada yang mempersiapkan diri dengan kemampuan yang diperoleh dari bangku sekolah, maka untuk itulah Soeparno berketetapan hati untuk terjun ke dunia kepamong prajaan, hanya tujuannya sudah bergeser jauh dari tujuan semula. Kalau dulu tujuan masuk MOSVIA hanya sekedar memenuhi cita-cita untuk meneruskan karier orang tua, sekarang menjadi pegawai pamong praja dengan tujuan yang jauh yaitu Untuk "menjembatani" roda pemerintahan dari alam kolonial ke alam merdeka. Dari segi inilah Soeparno ingin mendukung cita-cita bangsanya.

Soeparno mula-mula menjadi AIB (Ambtenar Inlands Bestuur) di Kabupaten Bogor, kemudian diangkat menjadi Mantri Polisi Bestuur Bumi Putra. Untuk pertama kalinya ia mengucapkan sumpah sebagai pegawai negeri pada tanggal 30 Juni 1939 sebelum dipindahkan ke Kewedanaan Cipanas setahun kemudian. Di Cipanas juga bertugas hanya satu tahun, selanjutnya pada bulan Juli '41 ia dipindahkan ke Jatinegara, sebagai Mantri Polisi Bestuur Bumi Putra yang diperbantukan pada Kewedanaan Mester Cornelis Jatinegara.

Kewedanaan Jatinegara meliputi daerah dalam kota dan luar kota, seperti Kecamatan Pulogadung, Kecamatan Pasarrebo, Kecamatan Pasarminggu. Masing-masing kecamatan mempunyai Mantri Polisi, kecuali Kecamatan Pulogadung, Mantri Polisi-nya dirangkap oleh Mantri Polisi Mester Cornelis Jatinegara yang dijabat oleh Soeparno.

Sebagai Mantri Polisi Bestuur di Kawedanaan, Soeparno mempunyai tugas berat, karena ia harus menjalankan tugas-tugas Kepolisian di Daerah Kawedanaan Mester Cornelis, di mana ia selalu diharuskan untuk berhubungan dengan petugas Kepolisian di daerah Kawedanaan Mester Cornelis Jatinegara dengan erat. Akan tetapi Polisi Pamong Praja pada saat itu, lebih merupakan alat kekuasaan kepamong prajaan dari pada sebagai alat untuk mempertahankan keamanan, ketertiban dan keselamatan umum.

Khusus di Kecamatan Pulogadung yang tidak mempunyai Mantri Polisi, maka penanganan masalah-masalah kepolisian dirangkap oleh Mantri Polisi Kawedanaan Mester Cornelis Jatinegara. Masalah-masalah kepolisian yang dimaksud adalah: kejahatan, pelanggaran, yang dilakukan oleh masyarakat umum, di mana pada saat itu Mantri Polisi juga berwenang mengajukan perkara ke depan Pengadilan. Dengan demikian harus ada kerja sama yang baik antara Mantri Polisi dengan Polisi setempat di dalam mengurus perkara yang akan disampaikan kepada jaksa untuk kemudian dilanjutkan ke Pengadilan.

Tidak antara lama setelah Soeparno pindah ke Kecamatan Pasarminggu, pecah Perang Dunia II, dan Jepang masuk ke Indonesia.

Untuk memperkuat tugas-tugas kepolisian, maka seluruh Polisi Pamong Praja yang berada di Jawa dan Madura dilebur di dalam Keisatsu, selanjutnya disebut Polisi. Agen-agen Polisi dan Mantri Polisi Pamong Praja diangkat menjadi pegawai Polisi menurut penyesuaian pangkat. Untuk Mantri Polisi Pamong Praja diberi pa *Itto Keibuho* atau Ajun Inspektur Polisi.

Tanggal 23 April 1943, Soeparno yang pada saat itu bekerja sebagai Mantri Polisi Pamong Praja, diangkat menjadi Polisi umum dengan pangkat *Itto Keibuho* atau Ajun Inspektur Polisi Kelas Satu dan ditugaskan untuk pertama kalinya di *Keisatsu Sho* atau Detasemen Kepolisian di Tangerang. Tidak antara lama Soeparno dipindahkan ke Jakarta, yaitu pada Kantor Besar Kepolisian Karesidenan atau *Jakarta Syu Keisatsu Bu* pada bulan Januari 1944.

Empat bulan kemudian menyusul kenaikan pangkatnya menjadi *Nitto Keibu* atau Inspektur Polisi Kelas Dua. Sesuai dengan kepangkatannya yang baru, ia disertai jabatan sebagai Kepala Bagian Ekonomi atau *Kei Zie Keisatsu*. Pada waktu itu yang menjabat sebagai Residen (*Syu Tyo Kang*) Jakarta adalah Soetardjo Karto Hadikoesoemo yaitu bekas anggota *Volkstraad*, Ketua Fraksi Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi Putra (PPBBP), sedangkan Kepala Polisinya adalah Komisarisi Polisi Kelas Satu Abdul Rifai.

Pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia terdapat

sistem dualisme di bidang Kepolisian, artinya ada dua badan Kepolisian, yaitu Kepolisian untuk menjaga keselamatan atau kepentingan bangsa Jepang, yang pada umumnya tidak dikenal oleh masyarakat dan badan Kepolisian untuk bangsa Indonesia.

Polisi Nasional bentukan pemerintah Belanda diganti dengan Kepolisian yang bersifat regional menurut daerah pendudukan Jepang. Untuk wilayah Jawa dan Madura dibawah pendudukan angkatan darat Jepang, dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Pendudukan yang disebut *Gunsikan* di mana bidang teknis Kepolisian, dibantu oleh Kepala Departemen Kepolisian atau *Gunseikan Butyo*.

Masing-masing lingkungan daerah pemerintahan dibagi dalam *Syu*, yang luasnya sama dengan sebuah Karesidenan. Tiap-tiap *Syu* dikepalai oleh seorang *Syutyokang* dan bertanggung jawab juga terhadap masalah keamanan dan ketertiban umum di seluruh Karesidenan. Pimpinan sehari-hari di bidang teknis Kepolisian dijalankan oleh seorang Kepala Bagian Kepolisian yang disebut *Keisatsu Butyo* yang kemudian disebut selanjutnya disebut Kepala Bagian Keamanan atau *Chiang Butyo*. Kepala Polisi Karesidenan membawahi Kepala Polisi Detasemen.

Untuk kota Jakarta diadakan Polisi Kota Jakarta yang berada di bawah langsung Kepala Polisi Kota Jakarta. Sebelumnya Polisi Kota Jakarta membawahi pada Polisi Karesidenan Jakarta.

Pada saat itu, menurut pasal 1 RIB, yang berbunyi:

Melakukan tugas kepolisian pada bangsa Indonesia dan pada bangsa asing, menurut perbedaan yang diadakan dalam reglemen ini, diwajibkan pada pegawai, pejabat-pejabat dan orang-orang yang istimewa yang disebut di bawah ini, masing-masing sekian keluasan daerah, untuk mana ia diangkat:

1. Kepala-kepala desa dan kepala kampung serta sekalian pejabat polisi bawahan yang lain, bagaimanapun namanya, termasuk juga pejabat-pejabat polisi yang diangkat untuk tanah partikelir;

2. Kepala-kepala distrik;
3. Bupati-bupati dan patih;
4. Residen-residen;
5. Semua pegawai, pejabat, dan orang-orang lain, dalam perkara yang diserahkan kepadanya supaya dijaganya, menurut aturan undang-undang yang istimewa;
6. Pegawai-pegawai polisi yang tidak dapat gaji masing-masing mengenai kekuasaan yang diberikan padanya dalam angkatannya yang diangkat sedemikian dengan mengingat aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Penjabat-penjabat pemerintah yang tercantum dalam pasal 1 RIB, diberikan wewenang untuk menjalankan tugas-tugas kepolisian, akan tetapi mereka lebih banyak memusatkan tenaga dan fikiran untuk melipat gandakan hasil bumi serta menggerakkan romusha demi kemenangan Jepang dalam perang Asia Timur Raya, maka soal-soal kepolisian diserahkan sepenuhnya kepada Polisi umum.

Akhir tahun 1944, Soeparno sebagai Kepala Bagian Ekonomi dipindahkan lagi menjadi Kepala Bagian Intel (Koto Keisatsu), tetapi hanya sebentar karena pihak Jepang telah bertekuk lutut pada Sekutu.

Menjelang keruntuhannya, pihak Jepang telah mengundang seluruh staf Kepolisian Karesidenan Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1945 bertempat di suatu restoran (sekarang Hotel Duta Merlin). Soeparno dan kawan-kawannya dijamu sekedarnya, di mana seolah-olah merupakan perpisahan. Akan tetapi pihak Jepang sama sekali tidak memberitahu, bahwa pada hari itu mereka telah ditundukkan oleh pihak sekutu.

(bersambung)



The prime criterion of whether a guy will make a good police officer is this ability to make judgments. And make'em constantly, over a long period of time We all are judges, all the time.

(Officer al Tennison Laconia Police department 1971)



POLICE OPPRESSORS OR OPPRESSED?

*"God and Policeman alike we adore,
But only while in danger and not before,
Danger over both are alike requitted,
God is forgotten and Policemen slighted"*

— Rudyard Kipling.

So low is the opinion of the police in India that had Kipling not had a clean record with them, he would probably have been accused of writing the lines a poetic bribe to avoid brutality at their hands.

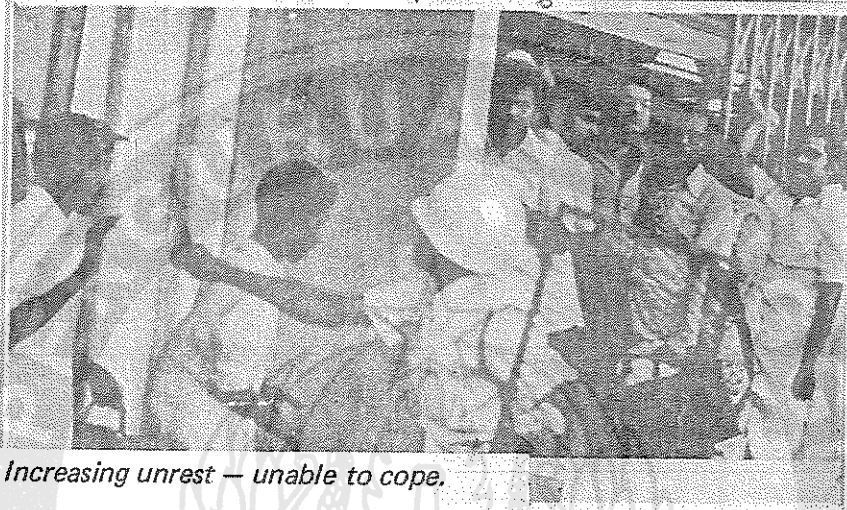
The Indian Police are brutal. That is the most common allegation against our policemen. And it is true. But a day spent in a police station would show the frustration that causes the violence. "This is the fourth time we have had to leave him on bail and each time he comes back vabing committed an even more heinous crime," says an exhausted police official of a hardened criminal. And as the officer's anger and desperation increases, he swears venomously: "The next time he comes back, I will break his legs."

A cursory look at the Indian laws reveal why policemen believe they have no other option but to resort to third degree methods. For one thing, once the police arrest a criminal, they lose all control over him. The case goes to the court and many lawyers use every conceivable method, legal and illegal, to defend him. "In most cases," reveals a senior police official, "our witnesses are harassed and threatened and sometimes even murdered by the criminals, occasionally right in the court' compound."

Policemen bitterly resent the fact that in the case of encounters with dacoits, if a dacoit is killed, an inquiry is held and several police officials tried. But if a constable dies, no tears are shed. His bereaved family is given a token reward of Rs. 5000 for his bravery. "My men are worth much more than a pathetic Rs. 5000." rages an official. "In this fight between the criminals and society, the law is indisputably on the side of the law breakers." The criminals are bailed out repeatedly and left free to commit crimes, 34 per cent of bailed criminals commit other crimes, according to a survey by the Indian Institute of Law. But it is the police who are blamed for inefficiency, corruption and for their inability to prevent crime. "We are the ones treated like criminals," storms the official. And as the law is unable to deal with the criminals, the frustrated policemen are forced into beating him physically in a bid to prevent him from committing any more crimes.

Psychologically, policemen are bound to feel much more intensely against criminals than judges. In the case of a murder or stabbing, the sight of the blood-bathed body of the victim has a tremendous effect on policemen, strengthening their hatred.

Antiquated laws are not the only hindrance to the policeman. Often especially in the case of riots — the government has also taken anti-police stands. "We are supermen, aren't we?" jeers the official. "How are we expected to stop riots through peaceful means? Have you ever seen a riot?" he asks. "They throw bottles and bricks and these can kill us. The cane shields we get are like paper. How else can we stop the mob except by attacking? And can you blame us if we sometimes lose control? How would you react if someone hit you on your face with a brick?"



Increasing unrest – unable to cope.

★ Their situation is indeed unenviable. They are faced with the wrath of violent mobs in front and the wrath of the subsequent inquiry and condemnation like a dagger poised behind their back. The policemen feel trapped.

Apart from being accused of brutal and inhuman behaviour, the police are also loudly abused as inefficient and dishonest. This is also true. And again the reasons are many. Their equipment is one factor. An inspector at a police station in Delhi describes his vehicles as "fit only for the junkyard." Additionally, petrol has been rationed since 1979, affecting their mobility. An antique armoury adds to their woes. The guns they get are those rejected by the army. "Some of our muskets," says an officer, "are found in museums abroad." Bemoans the officer: "Because of their weight, they cannot even be used as a baton. During riots, our only defence is a weak cane shield which has often proved to be more of liability than an asset, since it ties one hand down."

Further, the laws lead to greater inefficiency. For example, in the event of an accident, the car seized for mechanical inspection by a sub-inspector cannot be returned to the owner as the law does not permit it. To get back his car, the owner has to go to the court of law, but he blames the police for their apathy. The queer aspect being that while a subinspector can release on bail an



Constable — long hours, low pay.

accused person arrested for cheating, he cannot be trusted by the law to return the car to its owner. So while it is the law that breeds inefficiency, the police has to take the blame for it.

There is yet another incredible provision in the law which virtually encourages inefficiency. While seizing opium or illicit liquor, a policeman is required to have two independent public witnesses. "Where", asks an officer with great patience, "are we supposed to find two such witnesses at midnight on a deserted road?"

Criticising such laws, the police official suggests: "just as trust begets trust, distrust provokes suspicion and indignation." He further affirms that until the trust of the law is reposed among policemen, inefficiency will continue to plague our policing system. While it is the duty of the police to keep the roads clean, says the official, the licences for hawkers and vendors are given by the municipalities. This dual control, he says, adds to inefficiency and corruption, both in the police as well as in the municipalities.

Also, with the enormous increase in the urban population, most police officials feel that the pattern of city violence has undergone a radical change. Unless the situation is tackled rapidly and vigorously, it could easily build up into a real problem. Under the present system, in areas where the Commissioner method is not prevalent, police officers who are required to shoulder full responsibility for maintaining law and order have to spend considerable time in consulting the concerned magistrates and obtaining orders from them. This creates a gap in response time. By the time a decision is taken to deal with a situation, considerable damage to life and property, and more than that to the morale of law abiding citizens, has been done.

In his report on the police in India, Justice G.D. Khosla says that the policeman in India is too oppressed to be efficient and honest. Sympathising with the police he believes: "In India in general and in Delhi in particular, the office of a constable has no aura of respectability whatsoever. He is distrusted by the law, disliked by the people, classed as a scavenger and a *chowkidar* in respect of the quantum of his pay and allowances." Justice Khosla further states in his report: "In this climate it is impossible for the policeman to be efficient."

A constable or even a head constable of the Indian Police Force lives in conditions which in themselves make dishonesty inevitable and perhaps even necessary for survival. A constable gets a salary of Rs. 300. He has to work seven days a week. Says the official: "My men stand at a traffic point both in sun and rain for eight hours at a stretch. Frequently they have to work at nights. Often they live without their families, either in barracks or in slums, or even on the footpath."

An interesting comparison is that between a peon and a constable. A peon, who has same qualifications as a constable, draws a salary Rs. 500 per month and does no other work than within the stipulated office hours of 9 a.m. to 5 p.m. The constable, on the other hand, earns less, can be called for work at any time, does fatiguing work and has to stay away from his family. It is hardly surprising that he takes bribes and is corrupt.

On the existing emoluments and service conditions, recruitment of the right kind of persons in the ranks of constables and

sub-inspectors is a problem of considerable magnitude, as those who do possess the required intellect and ability get better jobs in the private and government sectors. In a survey recently carried out, it was found that none of the boys who have passed their higher secondary examinations from Delhi are willing to join as constables. And only those graduates who have a third division opt for the post of a sub-inspector. It is thus evident that unless the service conditions in the lower ranks of the police force are improved, its standard will continue to decline.

As a system, the police represents the government. The reaction of the masses against the police is a reaction against the government and its policies. It is only with a government determined to help the police that the conditions in our police force can improve.

Political intervention has often helped criminals escape from the police. It is often found that a number of criminals are on the pay roll of politicians. In case any of them are caught by the police, their political godfathers use their influence to get the criminals out of trouble. In case an official does try to defy the politicians, he is immediately transferred.

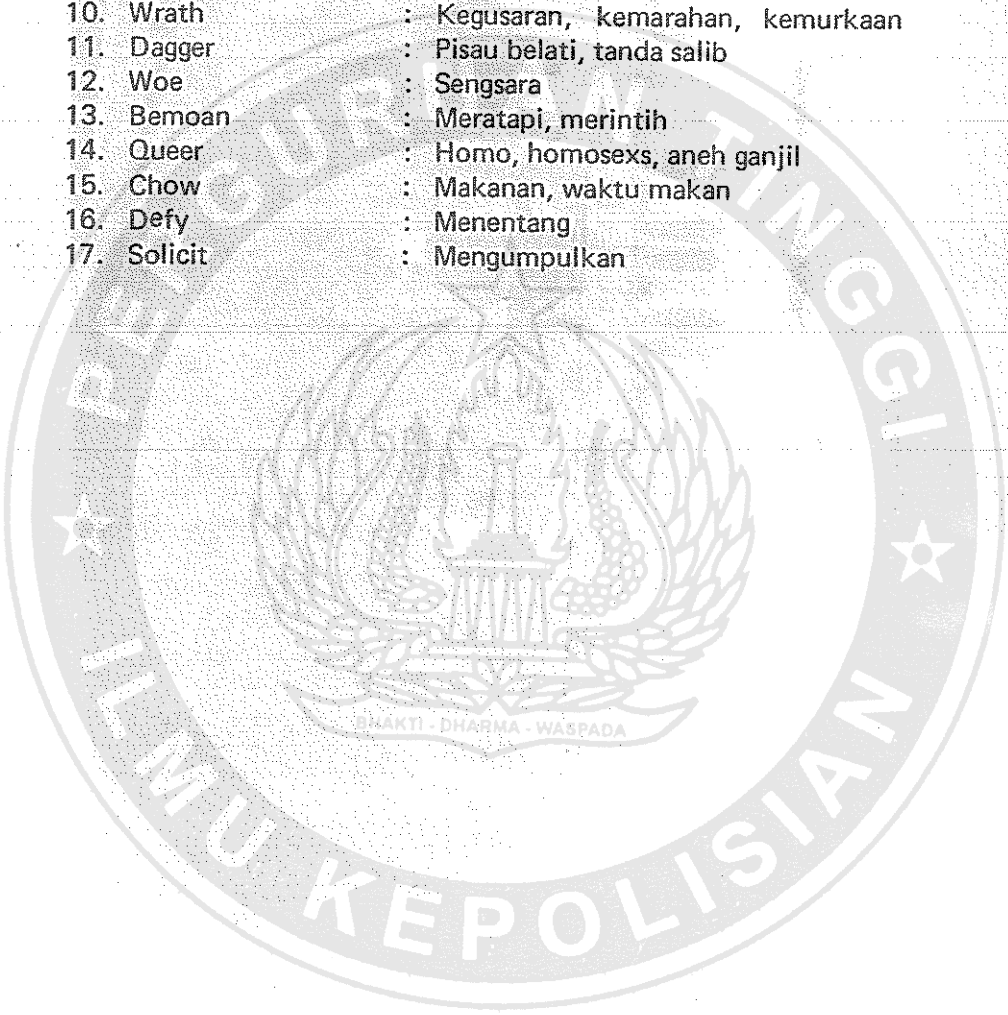
Unless there are urgent and radical changes made in the police, unless the laws are made more responsive to reality and less solicitous of the criminal, incidents like the Bhagalpur blindings and police riots will continue to plague our police system as it hobbles along, crippled with inefficiency and dishonesty.

KATA-KATA SUKAR

- | | |
|-----------------|--------------------------------------|
| 1. Oppress | : Menindas, menekan |
| 2. Bribe | : Uang sogok, suap, uang semir |
| 3. Bail | : Uang tanggungan, penjamin, jaminan |
| 4. Venemous | : Berbisa, sengit |
| 5. Cursory | : Sambil, sepintas lalu |
| 6. Indiaputable | : Tak dapat disangkal, dibantah lagi |
| 7. Tremendous | : Hebat sekali, mahahebat, dahsyat |
| 8. Antiquated | : Kuno |

BHAYANGKARA

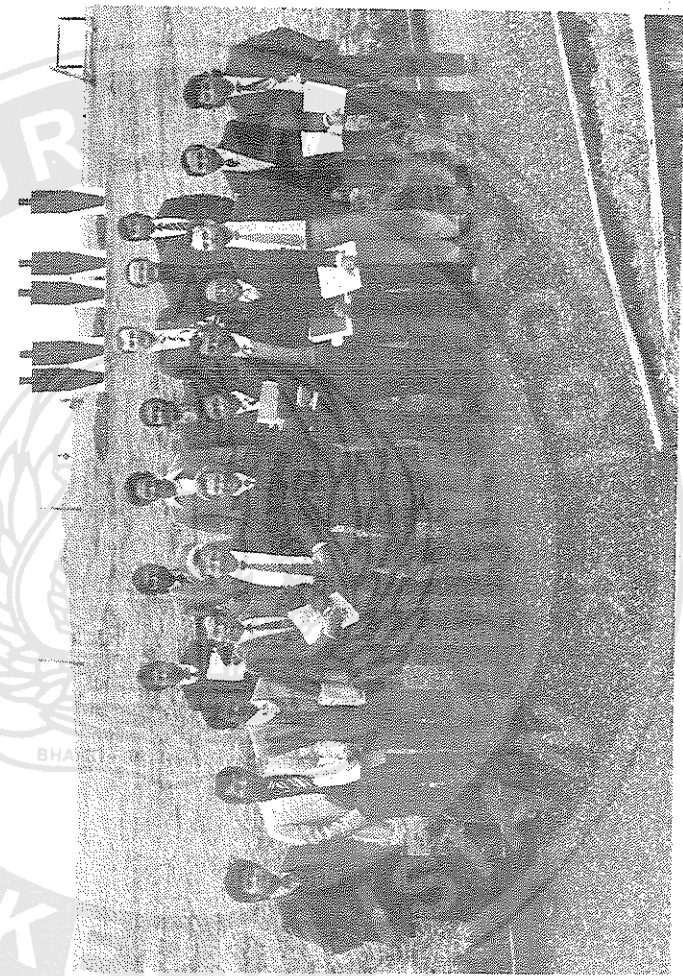
9. Envy : Cemburu, irihati
10. Wrath : Kegusaran, kemarahan, kemurkaan
11. Dagger : Pisau belati, tanda salib
12. Woe : Sengsara
13. Bemoan : Meratapi, merintih
14. Queer : Homo, homoseks, aneh ganjil
15. Chow : Makanan, waktu makan
16. Defy : Menentang
17. Solicit : Mengumpulkan



Keterangan foto

15 orang Pewira Polri yang ditugaskan bejajarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia di Jerman Barat selama 16 bulan. Berdiri di depan dari kiri ke kanan:

- Drs. Didi Widayadi, Drs. Sulitno, Drs. Da'i Bachtiar, Drs. Nurfaizi, 2 orang inspektur Jerman, Drs. Wayan Ardjana, Drs. Fajar Istiono RH, Drs. Yossy Suryosumirat, instruktur, Drs. John Lalo, Drs. Ade Hidayat. Belakang dari kiri ke kanan: Drs. Engkesman R Hillep, Drs. Ketut Redana, Drs. Hamim, Drs. Sardjono, Instruktur, Drs. Iwan Marwanto, Drs. Miftahol Arifin.



RUANG KEPUSTAKAAN

I. DAFTAR ISI BUKU TERPILIH

1. Mark, Sir Robert.

Policing a perplexed Society. — London: George Allen & Unwin Ltd.: 1977.

132 p: Illus : cm.

Content (Isi)

1. Cornerstones of excellence (Dasar/landasan terbaik)	p. 7
2. Keeping the peace in Great Britain (The differing roles of the police and the army) Memelihara perdamaian/kerukunan di Inggris Raya (Perbedaan peranan polisi dan Angkatan Darat) ...	p. 23
3. Liberty without responsibility (Kebebasan tanpa tanggung jawab)	p. 34
4. A compellable witness	p. 44
(Pemaksaan saksi)	
5. Minority verdict (Putusan dari golongan kecil)	p. 55
6. Social violence	p. 74
(Kekerasan masyarakat)	
7. The Metropolitan police and political demonstrations (Polisi metropolitan dan demonstrasi-demonstrasi politik)	
8. A sufficiency of seed on fertile ground (Benih yang cukup ditanah yang subur)	
Appendix: Relations with the news media	p.123
(Tambahan: Hubungan dengan mass media)	
Index (Indeks).	

2. Muir, William Ker Jr.

Police: Streetcorner politicians/By William Ker Muir Jr.— Chicago: The University of Chicago; 1977. 306 p; cm.

Contents (Isi)

Acknowledgments XI (Pernyataan-pernyataan tanda terima kasih)

1. The problem of coercive power (Masalah kekuatan memaksa)	
1. What is a good policeman?	3
(Apa itu polisi yang baik)	
2. Four policemen.....	13
(Empat orang polisi)	
3. The extortionate transaction	37
(Transaksi pemerasan)	
4. The profesional political model of the good police man (Contoh keahlian politik dari polisi yang baik)	47
2. The four paradoxes of coercive behavior (Empat paradoks dari tingkah laku memaksa)	
5. The paradox of dispossession: skid row at night (Paradok dari orang miskin: perkampungan jem- bel pada malam hari)	61
6. Paradox of detachment: The family beef (Para- dok dari sikap tak berpengaruh: keluarga yang suka mengeluh)	82
7. The paradox of face: The crowd scene (Para- dok dari kenyataan: Tempat kejadian yang pe- nuh)	101
8. The paradox of Irrationality: The Juvenile caper (Paradok hal-hal yang irasional: anak-anak/remaja dengan sifat yang melonjak-lonjak)	126
9. The responses to the four paradoxes of coercive- power (Tanggapan keempat paradok dari keku- atan memaksa)	144
3. The development of policemen (Perkembangan petugas polisi)	
10. The development of understanding (Perkem- bangan pengertian)	153
11. The development of morality (Perkembangan Moral)	189

12. Causing professionalisim (penyebab profesional)	225
4. Implications (Implikasi-implikasi)	
13. The chiefs choices (Pilihan kepala)	263
14. Does coercive power tend to corrupt? (Apakah kekuatan memaksa cenderung ke korupsi?)	270

